

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulajid, Syawal dan Anshar, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM: Suatu Kajian Dalam Teori Pembaharuan Pidana*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Afandi, Ali, 1997, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dalam Barda Nawawi Arief Perbandingan Hukum Pidana*, Rajali Pers, Jakarta.
- _____, 2008, *Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- _____, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alma, Bukhari, 2006, *Pengantar Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Tindak pidana dengan Pidana Penjara*, BP Universitas Diopnegoro, Semarang.
- _____, 2002, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika
- Haryomatam, GPH, 1994, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret UNiversity Press, Surakarta
- Hiariej, Eddy O.S., 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Ilyas, Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education dan Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta.

- Kolkman, Wilbert D., dkk., 2012, *Hukum Tentang Orang Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Pustaka Larasan, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 2001, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Alumni, Bandung Prasetyo, Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Salam, Moch. Faisal, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sianturi, S.R., 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni, Jakarta.
- _____, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Babinkum TNI, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remi, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Siti Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tambunan, A.S.S., 2005, *Hukum Militer Indonesia Suatu Pengantar*, Pusat Studi Hukum Militer STHM, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Miltier

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer.

Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Atasan Yang Berhak Menghukum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tertanggal 17 Februari 2012.

C. Jurnal

Ali, Mahrus, 2011, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasri Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat", *Jurnal Hukum Vol.18* No.2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta.

Candra, Septa, dkk., "Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang", *Jurnal Cita Hukum Volume I*, Fakultas Sariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Kristian, 2013, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-43 No.4 Oktober-Desember, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Markoni, Brigjen TNI, "Tanggapan Terhadap RUU Hukum Disiplin Miltier Ditinjau Dari Aspek Pembinaan Personel dan Pembinaan Satuan", *Jurnal Hukum Militer Volume 2 Nomor 1*, November 2014, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer., Jakarta.

Prayogo, R Tony, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-

Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol.13 No.02-Juni 2016*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta,

D. Skripsi dan Tesis

Altair, Jan Muhammad, 2017, “Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Erwin, Olivia Oktari, 2017, “Kebijakan Formulasi Mengenai Illicit Enrichment Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Fathir, Muhammad, 2009, “Penerapan Hukum Disiplin Militer Terhadap Taruna (KARBOL) Akademi Angkatan Udara Dalam Pelanggaran Hukum Disiplin Militer”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Fitra, Wahyu, 2017, “Urgensi Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana Militer”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Hartono, Made Sugi, 2014, Pertanggungjawaban Pidana Pengganti Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak yang Mengakibatkan Kematian (Suatu Analisis Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana), *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,

Larasati, Cindy Fajar, 2018, “Penerapan Hukum Disiplin Militer Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Lestari, Endang Sri, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,

Prasetyo, Allan Hermit, 2017, “Kontradiksi Pengaturan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin dalam Hukum Disiplin Militer dan Hukum Pidana Militer”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Setiyono, Joko, 2010, “Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility*) Dalam Pelanggaran Ham Berat (Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Indonesia), *Disertasi*, Program Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Tarta, Ahmad Firman, 2015, “Penjatuhan Pidana Pemecatan Terhadap Militer Pelaku Tindak Pidana Umum”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wongkar, Vonny A., 2006, Tanggung Jawab Komando Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat dan Kejahatan Perang Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

E. Website

Franedya, Roy, 2019, “Nyinyir Soal Wiranto di Medsos 7 Anggota TNI Kena Sanksi”, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/nyinyir-soal-wiranto-di-medsos-7-anggota-tni-kena-sanksi>, diakses pada 5 Januari 2020.

Kanwil Sulsel, 2019, “PILKADES dan TNI”, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/-pilkades-dan-tni>, diakses pada 4 Februari 2020.

Kemdikbud, 2016, “Induksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/induksi>, diakses pada Minggu 9 Februari 2020.

Kemdikbud, 2016, “Deduksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi>, diakses pada Minggu 9 Februari 2020.

Kemdikbud, 2016, “Kedinasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/deduksi>, diakses pada Minggu 1 Maret 2020.

Merdeka, 2019, “Jari-jari Nakal Tiga Istri Prajurit TNI Antarkan Suami ke Bui”, <https://www.merdeka.com/peristiwa/jari-jari-nakal-istri-prajurit-tni-antarkan-suami-ke-bui.html>, diakses pada 5 Januari 2020.

Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, “Tentara Sebagai Tentara Profesional”, <https://tni.mil.id/view-2776-tni-sebagai-tentara-profesional.html>, diakses pada 2 Januari 2020.

Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia, 2006, “Penyenggaraan Pertahanan Negara Sesuai dengan Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (TRIDEK)”, <https://tni.mil.id/view-5042-penyenggaraan-pertahanan-negara-sesuai-dengan-doktrin-tni-tri-dharma-eka-karma-tridek.html>, diakses pada 24 Desember 2019.

Retaduari, Elza Astari, 2019, “Ini Aturan yang Nyatakan Kegiatan Pribadi Istri Tak Lepas dari Kehidupan TNI”, <https://news.detik.com/berita/d-4745499/ini-aturan-yang-nyatakan-kegiatan-pribadi-istri-tak-lepas-dari-kehidupan-tni>, diakses pada 6 Januari 2020.

Sri Sumiyati, 2019, “Meningkatkan Integritas dan Komitmen Prajurit TNI AU Guna Mewujudkan Profesionalisme dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi”, <https://tni-au.mil.id/meningkatkan-integritas-komitmen-prajurit-tni-au/>, diakses pada tanggal 24 Desember 2019.